

BAB IV

ANALISIS FRAMING BERITA PEMBAKARAN MASJID DI TOLIKARA

A. Isu/Peristiwa 1: Kronologi Insiden Pembakaran Masjid

Tidak ada asap jika tidak ada api. Ungkapan itu rasanya tepat menggambarkan sebuah konflik yang terjadi pasti memiliki sebab-sebab tertentu yang menyulut adanya pertentangan dan berujung konflik. Kronologi terjadinya insiden pembakaran pada berita penting untuk disampaikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Jika terjadi perbedaan informasi di media online mengenai kronologi kejadian dimungkinkan karena narasumber yang diwawancarai berbeda, namun jika narasumbernya lalu terjadi perbedaan maka patut dapat dipastikan wartawan dan pihak media tersebut memiliki kepentingan tersendiri dalam menyampaikan berita. Hal itu bisa dilakukan dengan menghilangkan sebagian fakta atau bahkan memanipulasi data. Berikut ini penulis merangkum skrip berita mengenai kronologi pembakaran insiden Masjid di Tolikara yang diberitakan Media Online Detik.com dan Republika.co.id

1. *Frame Detik.com: Kronologi Penyerangan Warga di Tolikara* Versi POLRI

Satu hari setelah terjadinya peristiwa di Tolikara, yaitu pada tanggal 18 Juli 2015 Detik.com langsung merilis berita mengenai kronologi terjadi insiden pembakaran Masjid tersebut. Berita yang dirilis

Detik.com berjudul “Kronologi Penyerangan Warga di Tolikara Versi Polri”.

Dari analisis *sintaksis*, *headline* atau judul yang ditampilkan menegaskan bahwa Detik.com sepenuhnya berperan sebagai informan saja dengan merilis kronologi penyerangan yang disandarkan pada versi kepolisian. Namun dalam prinsip peniitian ini butuh diselidiki apakah kronologi versi POLRI yang disampaikan di lapangan sesuai atau tidak dengan rilis yang dikeluarkan Detik.com. Fakta ini akan penulis ungkap lebih lanjut pada analisis skrip yaitu mengenai kelengkapan unsur berita maupun saat dibandingkan dengan berita lain yang juga merilistema berita yang sama.

Dalam teks berita tersebut Detik.com menjadikan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Suharsono sebagai narasumber. Suharsono menjelaskan proses terjadinya insiden mulai dari awal kedatangan para pelaku penyerangan hingga proses penyelidikan yang telah berlangsung. Pada paragraf akhir berita ini terdapat kutipan pernyataan dari Kabid Humas Polda Papua Kombes Patridge yang menekankan kembali bahwa sebelum peristiwa ini terjadi, telah ada pernyataan dari pihak GIDI yang mengeluarkan surat berisi imbauan agar tidak ada kegiatan salat Id. Karena pada saat yang sama akan diadakan acara perayaan hari ulang tahun Gereja mereka.

Mengambil dua pernyataan yang sama dari dua orang yang berbeda sebagaimana yang dilakukan oleh Detik.com menurut penulis adalah sebuah upaya memberikan penegasan dan penekanan berlebih terhadap hal

tersebut. Yaitu bahwa GIDI telah memberikan himbauan agar tidak melaksanakan salat Id. Kemudian mengakhiri berita dengan pernyataan Patrige bahwa surat telah diteruskan ke Polres, instansi gereja, pengurus masjid dan tokoh agama, mengindikasikan upaya melegitimasi surat tersebut. Sehingga dalam hal ini, khalayak digiring pada opini bahwa GIDI tidak bersalah karena telah lebih dahulu mengimbau dengan surat secara resmi.

Dari analisis skrip, Detik.com memenuhi unsur Apa (*What*) dengan menjadikan penyerangan terhadap warga sebagai sebuah tema utama. Unsur ini berada pada *Lead* berita dengan penegasan bahwa ini adalah kejadian penyerangan terhadap warga. Hal ini sedikit berbeda dengan media pada umumnya yang menyatakan peristiwa ini sebagai pembakaran Masjid.

Unsur Kapan (*When*) pada berita ini telah terpenuhi dengan menyebutkan bahwa penyerangan dimulai pada pukul 07.05 WIT dan disebutkan pula unsur Di mana (*Where*) yaitu Karubaga, Kabupaten Tolikara sebagai tempat terjadinya peristiwa.

Kemudian pada unsur Siapa (*Who*) atau orang yang melakukan, penulis menilai bahwa ada fakta yang ditutupi pada unsur ini. Hal ini dikarenakan Detik.com hanya menulis pelaku penyerangan sebanyak 70 orang tanpa menyebutkan siapa dan berasal dari mana orang-orang tersebut. Padahal pada teks berita lain kita akan temui bahwa pelaku penyerangan jelas disebutkan adalah umat Kristiani. Di satu sisi penulis memaknai ini dapat berdampak positif untuk mencegah konflik antar

agama lebih lanjut namun di sisi lain ini merupakan bagian dari ketidaklengkapan berita bahkan dapat disebut sebagai upaya penyembunyian fakta.

Pada unsur Mengapa (*Why*) pada berita ini, Detik.com mengambil versi POLRI bahwa penyerangan yang dilakukan oleh 70 orang warga adalah bentuk penolakan mereka agar kegiatan salat Id ditiadakan karena GIDI akan mengadakan perayaan hari ulang tahun Gereja mereka.

Kronologi dijelaskan lebih lanjut dan memenuhi unsur Bagaimana (*How*) dengan mengutip versi POLRI bahwa Penyerangan diawali dengan teriakan provokasi kemudian aparat menghalau mereka. Kemudian para penyerang justru melempari aparat dengan batu dan mengejar polisi sehingga polisi melakukan tembakan ke udara untuk membubarkan massa yang anarkis.

Tabel 2. Kronologi Penyerangan Warga di Tolikara Versi Polri

Judul Berita : Kronologi Penyerangan Warga di Tolikara Versi Polri	
Unsur 5W + 1H	Skrip Berita
Apa (What)	Penyerangan terhadap warga saat salat Id
Kapan (When)	Penyerangan dimulai Pukul 07.05 WIT
Di mana	Karubaga Kabupaten Tolikara, Papua

(Where)	
Siapa (Who)	70 orang penyerang
Mengapa (Why)	Pada skrip berita tersebut dijelaskan alasan 70 orang menyerang warga adalah bentuk penolakan mereka agar kegiatan salat Id ditiadakan.
Bagaimana (How)	Penyerangan diawali dengan teriakan provokasi kemudian aparat menghalau mereka. Kemudian para penyerang justru melempari aparat dengan batu dan mengejar polisi sehingga polisi melakukan tembakan ke udara untuk membubarkan massa yang anarkis.

Dari analisis *tematik*, berita ini menampilkan tiga tema besar kepada khalayak. *Pertama* adalah bahwa insiden ini merupakan penyerangan terhadap warga yang akan melaksanakan salat Id. Tema ini terlihat pada *Lead* berita yang dirilis Detik.com

Gambar 2. Lead berita Kronologi Penyerangan Warga di Tolikara Versi Polri

Jakarta - Sekitar 70 orang melakukan penyerangan terhadap warga saat salat Id di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. Menurut Polri, mereka meneriaki warga agar tidak menunaikan salat Id. "Pada saat warga muslim akan melaksanakan Salat Id, kan datang sekelompok massa (70 orang) memprovokasi. Bentuk provokasinya berupa teriakan. Intinya, mereka menolak agar tidak ada kegiatan Salat Id," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Suharsono saat dihubungi, Sabtu (18/7/2015).

Kemudian yang *kedua* adalah aparat dalam hal ini Polisi telah berjaga di

tempat kejadian dan juga telah melakukan upaya untuk mengantisipasi terjadinya serangan. Penulis menilai pasti akan muncul banyak pertanyaan mengapa masih bisa terjadi padahal Polisi telah berjaga dan mengantisipasi. Namun hal tersebut langsung dijawab dengan penekanan di akhir paragraf bahwa penyerang bersikap anarkis dan bahkan menyerang aparat.

Serta tema besar yang *ketiga* adalah sebelum peristiwa ini terjadi pihak GIDI telah memberikan imbauan untuk tidak melaksanakan salat Id di tempat tersebut karena khawatir mengganggu acara GIDI. Tema ini dapat ditangkap dari pernyataan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Suharsono yang mengatakan "Ada edaran pemberitahuan soal menolak kegiatan Salat Id dari GIDI. Bentuknya edaran." Dikuatkan pula dengan pernyataan Kabid Humas Polda Papua Kombes Patridge Renwarin yang mengatakan "Dalam surat mereka meminta ke umat muslim Tolikara tidak boleh Salat Id, karena pada saat yang bersama berlangsung hari kegiatan ulang tahun gereja mereka. Surat ini ditembuskan ke Polres, instansi gereja, pengurus masjid dan tokoh agama,"

Dari analisis *retoris*, Detik.com menyertakan gambar para personil POLRI yang semakin menegaskan bahwa kronologi yang disampaikan merupakan informasi langsung dari pihak POLRI.

2. Frame Republika.co.id: Ini Kronologi Pembakaran Masjid di Tolikara

Kejadian pembakaran Masjid yang terjadi pada Jumat pagi, langsung direspon oleh Republika.co.id dengan menurunkan berita berjudul "Kronologi Pembakaran Masjid di Tolikara" pada sore harinya. Hal ini menegaskan kembali

keunggulan media online yang bisa dengan cepat merilis berita, tidak seperti surat kabar yang harus menunggu keesokan harinya.

Dari analisis *sintaksis*, judul pada berita yang diturunkan Republika.co.id tersebut mengindikasikan bahwa isi pada berita juga merupakan gambaran dari pandangan Republika.co.id itu sendiri, karena judul tersebut tidak mencantumkan versi salah satu pihak sebagaimana berita yang dirilis Detik.com.

Dari *Lead* yang disajikan, Republika.co.id secara terang-terangan menyebutkan bahwa pelaku penyerangan adalah umat Nasrani. Secara emosional hal ini sejalan dengan latar belakang Republika sebagai media Islam, maka Republika tidak menutupi sedikpun apa yang dilakukan umat Nasrani kepada umat Islam. Pada teks berita tersebut Republika.co.id mewawancarai Humas Polri Kombes Agus Rianto, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Kombes Pol Patrige.

Dari analisis *skrip*, berita ini telah memenuhi unsur 5W + 1H. Diantaranya pada unsur Apa (*What*), Republika.co.id menjadikan dibakarnya Masjid oleh umat Nasrani sebagai fokus utama pemberitaan. Kemudian unsur Kapan (*When*), kejadian ini berlangsung pada Hari Jumat, 17 Juli 2015 pada pukul 07.00 WIT. Tidak berbeda dengan media online lain, Republika.co.id juga menjadikan Desa Karubaga Kabupaten Tolikara sebagai tempat kejadian insiden tersebut dan hal ini artinya memenuhi unsur Dimana (*Where*) yang harus ada pada sebuah berita.

Pada unsur Siapa (*Who*), Republika.co.id dengan berani menegaskan bahwa pelakunya adalah umat Nasrani. Secara kaidah jurnalistik sikap Republika.co.id telah tepat dengan memberitakan sesuai kenyataan tanpa

menutupi suatu fakta. Terlebih lagi hal ini memang telah ditegaskan pihak Polri selaku penyidik. Namun penulis menilai berita ini juga mengandung nilai provokasi karena dapat menyulut emosi umat Islam, atau setidaknya mengambil perhatian khalayak umat Islam untuk memberikan respon pada kejadian tersebut. Umat Nasrani dituding sebagai pelaku pembakaran sesuai dengan pernyataan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang mengatakan bahwa “Jemaat Nasrani merasa terganggu dengan speaker Masjid umat Muslim yang akan melakukan shalat Ied. Umat Nasrani mengklaim suara speaker yang dipasang di tengah lapangan mengganggu ketenangan umum.”²⁹

Kutipan di atas juga sekaligus mewakili unsur Mengapa (*Why*) pada berita tersebut. Kemudian mengenai surat larangan shalat Ied, pada berita ini dikatakan bahwa kepastiannya belum dapat dijamin karena masih berada dalam tahap penyelidikan.

Dari unsur Bagaimana (*How*), Republika.co.id mengambil keterangan dari Kombes Agus RIanto yang mengatakan bahwa kejadian ini diawali oleh sekelompok orang yang tiba-tiba berteriak di luar Masjid. Umat Muslim yang hendak melaksanakan shalat Ied seketika melarikan diri ke Koramil dan Pos 756/WMS untuk meminta perlindungan. Setelah ditinggalkan maka Masjid itu pun dibakar oleh orang-orang tersebut.

Tabel 3. Ini Kronologi Pembakaran Masjid di Tolikara

Judul Berita : Ini Kronologi Pembakaran Masjid di Tolikara	
Unsur	Skrip Berita

²⁹ Republika.co.id

5W + 1H	
Apa (What)	Masjid di Kabupaten Tolikara dibakar umat Nasrani
Kapan (When)	Jumat, 17 Juli 2015 pukul 07.00 WIT
Di mana (Where)	Desa Karubaga Kabupaten Tolikara
Siapa (Who)	Umat Nasrani sebagai pelaku pembakaran Masjid
Mengapa (Why)	Menurut Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, inti persoalan adalah jemaat nasrani merasa terganggu dengan speaker masjid umat Muslim yang akan melakukan shalat ied. Umat Nasrani mengklaim suara speaker yang dipasang di tengah lapangan mengganggu ketenangan umum.
Bagaimana (How)	Insiden diawali sekelompok orang yang berteriak meminta salat Id dibubarkan, kemudian terjadi perang mulut dan pihak nasrani melempar Masjid dengan api hingga terbakar. Selain Masjid, terdapat pula 6 rumah dan 11 kios yang terbakar.

Dari analisis *Tematik*, berita ini membawa tiga tema besar. Tema besar yang pertama adalah Masjid yang ada di Tolikara diserang dan dibakar oleh umat Nasrani pada saat umat Islam ingin melaksanakan shalat Ied. Tema besar pertama

ini terdapat pada *Lead* berita.

Tema besar yang kedua menyangkut inti persoalan dari insiden ini, yaitu umat Nasrani merasa terganggu dengan speaker Masjid umat Islam yang melaksanakan shalat Ied. Hal ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Dan tema besar yang ketiga adalah selain Masjid terdapat enam rumah dan sebelas kios yang terbakar. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepolisian Papua.

Kemudian dari analisis *Retoris*, berita ini menampilkan gambar Humas Polri Kombes Agus Rianto sebagai narasumber utama. Cara ini penting untuk meyakinkan khalayak bahwa berita yang disampaikan benar merupakan hasil wawancara dengan Kombes Agus Rianto. Republika.co.id juga mengisahkan kronologi terjadi peristiwa pembakaran dengan sangat dramatis mulai dari sekelompok masa umat Nasrani yang berteriak-teriak di luar kemudian umat Islam berlarian menghindari dan pada akhirnya terjadi peristiwa pelemparan api-api ke bangunan Masjid.

3. Perbandingan *Frame*

Pada unsur Apa (*What*) yang terdapat dalam tabel tersebut terlihat jelas adanya perbedaan. Detik.com menyebutkan ada 70 orang yang melakukan penyerangan terhadap warga. Sementara Republika.co.id menulis Masjid di Kabupaten Tolikara dibakar umat Nasrani. Dalam skrip tersebut Detik.com menyebut pihak penyerangan lebih spesifik dari segi jumlah, yaitu menyebut angka 70, beda halnya dengan Republika.co.id yang tidak menyebutkan jumlah sehingga tidak menggambarkan seberapa besar kekuatan para penyerang tersebut. Namun di sisi lain, [Republika](http://Republika.co.id) secara terang-terangan menyebut pihak yang

melakukan penyerangan adalah Umat Nasrani dan pada Detik.com tidak menyebutkan siapa pelaku penyerangan. Republika.co.id yang memang berlatar belakang Media Islam terkesan berani dengan menyebutkan pelakunya langsung, penulis menilai hal ini juga mampu memprovokasi Umat Islam setidaknya untuk respek pada insiden tersebut. Penulis juga beranggapan bahwa tidak disebutkannya pelaku penyerangan pada skrip berita Detik.com menggambarkan media ini sangat berhati-hati dalam menyampaikan informasi, sehingga Detik.com menyembunyikan fakta yang ada.

Jika dilihat dari sisi objek penyerangan, Detik.com menulis bahwa yang diserang adalah warga. Sementara Republika.co.id menulis bahwa jelas yang diserang adalah Masjid yang nantinya akan dibakar oleh Umat Nasrani. Penulis berani menyimpulkan bahwa Detik.com kembalikan menyembunyikan fakta, karena di seluruh media yang ada penulis dapati berita pada skripnya bahwa yang diserang adalah Masjid dengan cara dibakar, bukan justru penyerangan terhadap warga. Jika yang diserang adalah warga maka isu mudah digiring bahwa ini bukanlah konflik agama melainkan hanya kerusuhan masyarakat adat. Namun jika dinyatakan yang diserang adalah rumah ibadah maka ini jelas dipastikan bahwa telah terjadi konflik agama.

Selanjutnya dari unsur Mengapa (*Why*) pada tabel tersebut, Detik.com menulis bahwa peristiwa ini terjadi karena pada awalnya pihak penyerang sudah menghimbau agar kegiatan salat Id ditiadakan, artinya sudah ada peringatan sebelum kejadian. Namun Republika.co.id menulis pendapat Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang mengatakan bahwa insiden ini terjadi karena Umat Kristiani merasa terganggu dengan suara speaker Masjid yang dapat mengganggu

ketenangan umum. Ini artinya insiden tersebut terjadi karena respon pada saat yang sama, tanpa pengingatan sebelumnya.

Pada unsur Bagaimana (*How*) tidak terdapat perbedaan yang mencolok, hanya saja Republika menampilkan data lebih lengkap dengan disertakan jumlah bangunan yang terbakar diantaranya 6 rumah dan 11 kios serta tentu saja kembali ditekankan Masjid yang dibakar karena lemparan api Umat Nasrani. Sementara tidak disebutkannya dampak insiden pada Detik.com dapat berakibat penggiringan opini publik bahwa ini hanya insiden kecil.

Tabel 4. Perbandingan *Frame*

Unsur 5W + 1H	Detik.com	Republika.co.id
Judul	Kronologi Penyerangan Warga di Tolikara Versi Polri	Ini Kronologi Pembakaran Masjid di Tolikara
Apa (What)	Sekitar 70 orang melakukan penyerangan terhadap warga saat salat Id	Masjid di Kabupaten Tolikara dibakar umat Nasrani
Kapan (When)	Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 18 Juli 2015	Jumat, 17 Juli 2015 pukul 07.00 WIT
Di mana (Where)	Karubaga Kabupaten Tolikara, Papua	Desa Karubaga Kabupaten Tolikara
Siapa	Detik.com mewawancarai Kombes	Umat Nasrani sebagai

(Who)	Suharsono (Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri)	pelaku pembakaran Masjid
Mengapa (Why)	Pada skrip berita tersebut dijelaskan alasan 70 orang menyerang warga adalah bentuk penolakan mereka agar kegiatan salat Id ditiadakan.	Menurut Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, inti persoalan adalah jemaat nasrani merasa terganggu dengan speaker masjid umat Muslim yang akan melakukan shalat id. Umat Nasrani mengklaim suara speaker yang dipasang di tengah lapangan mengganggu ketenangan umum.
Bagaimana (How)	Penyerangan diawali dengan teriakan provokasi kemudian aparat menghalau mereka. Kemudian para penyerang justru melempari aparat dengan batu dan mengejar polisi sehingga polisi melakukan tembakan ke udara untuk membubarkan massa yang anarkis.	Insiden diawali sekelompok orang yang berteriak meminta salat Id dibubarkan, kemudian terjadi perang mulut dan pihak nasrani melempar Masjid dengan api hingga terbakar. Selain Masjid,

		terdapat pula 6 rumah dan 11 kios yang terbakar.
--	--	--

B. Isu/Peristiwa 2: Peran Pemerintah RI dalam menangani insiden pembakaran Masjid di Tolikara

Negara punya peran vital dalam menjamin keamanan dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam tubuh rakyat. Terlebih lagi jika kita melihat Nawacita yang senantiasa digaungkan pemerintahan Jokowi-JK maka kita akan melihat poin pertama dengan jelas menegaskan bahwa pemerintah akan “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.” Maka peran Pemerintah RI dalam hal ini akan sangat diperhatikan oleh masyarakat yang telah memberikan kepercayaan terhadapnya. Tidak heran berbagai media akan mempertanyakan sikap pemerintah jika dirasa belum terlihat kehadirannya menangani insiden ini. Berikut ini penulis memnggambarkan skrip pemberitaan Peran Pemerintah RI dalam menangani insiden pembakaran Masjid di Tolikara melalui Media Online Detik.com dan Republika.co.id

1. *Frame* Detik.com: Ini Aksi Pemerintah Jokowi Merajut Toleransi Beragama yang Terkoyak di Tolikara

Pada tanggal 19 Juli 2015 atau tepatnya dua hari setelah kejadian, Detik.com kembali merilis berita terkait pembakaran Masjid di Tolikara. Kali ini Detik.com mengangkat judul “Ini Aksi Pemerintah Jokowi Merajut Toleransi

Beragama yang Terkoyak di Tolikara”.

Dari analisis *sintaksis*, judul pada berita mewakili pandangan Detik.com. Dari judul tersebut Detik.com ingin membangun opini khalayak bahwa pemerintah telah merespon insiden yang terjadi, pemerintah tidak tinggal diam dan berupaya memperbaiki kondisi sosial yang ada agar konflik beragama tidak semakin merebak di Tolikara. Hal ini semakin diperkuat dengan *Lead* yang ditampilkan. Bahwa insiden penyerangan terhadap umat Islam di Tolikara saat shalat Idul Fitri Juli lalu telah memukul mundur toleransi beragama di Papua dan pemerintah telah berupaya memperbaiki.

Gambar 3. *Lead* berita Ini Aksi Pemerintah Jokowi Merajut Toleransi Beragama yang Terkoyak di Tolikara

Jakarta - Penyerangan terhadap umat muslim di Tolikara saat salat Idul Fitri memukul mundur toleransi beragama di Papua. Pemerintah sekuat tenaga merajut lagi kerukunan antarumat di Papua.

Kemudian dari analisis *skrip*, seluruh unsur yang wajib ada yaitu 5W + 1H telah ada pada berita ini. Detik.com mengisi unsur Apa (*What*), dengan merangkum aksi pemerintah yang sekuat tenaga memperbaiki toleransi beragama di Tolikara. Isu yang diangkat pada berita ini semakin menegaskan Detik.com sebagai media yang berhubungan secara harmonis dengan Pemerintahan Jokowi-JK. Detik.com menjadi pihak yang senantiasa membuat citra baik pada pemerintah dan tidak menggubris kejadian yang berpotensi memperburuk citra pemerintah.

Pada unsur Kapan (*When*), berita ini memuat kumpulan wawancara yang dilakukan wartawan Detik.com pada beberapa orang dalam pemerintahan. Diantaranya sebagai berikut; Wawancara terhadap Jusuf Kalla dilakukan pada

tanggal 19 Juli 2015. Wawancara Kapolri tidak disebutkan waktunya. Menteri Agama RI diambil pernyataan tertulisnya pada tanggal 17 Juli 2015. Lenis Kogoya diwawancarai pada Sabtu, 18 Juli 2015. Pernyataan demi pernyataan tersebut diambil pada waktu mulai hari kejadian hingga H+2 kejadian. Hal ini mengindikasikan keinginan memberitahukan pada khalayak bahwa respon pemerintah sangat cepat dalam menangani kasus ini.

Karena pernyataan-pernyataan itu diambil dari narasumber yang berbeda dan waktu yang berbeda maka unsur Dimana (*Where*) pada berita ini juga ikut beragam. Wawancara terhadap Jusuf Kalla dilakukan di kediamannya di Jalan Haji Bau, Makassar. Sedangkan untuk Kapolri diwawancarai di Papua. Kemudian Lenis Kogoya diwawancarai di Kantor Staf Khusus Presiden RI Gedung Sekretariat Negara, Jl Veteran III No 9-10, Jakarta Pusat dan wawancara Menteri Agama RI tidak disebutkan dimana beliau diambil pernyataan tertulisnya.

Kemudian pada unsur Siapa (*Who*), pemerintah menjadi pihak yang diangkat dalam berita ini. Dalam upaya menguatkan pandangannya Detik.com mewawancarai tiga orang narasumber yaitu Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI), Badrodin Haiti (Kapolri), Lenis Kogoya (Staf Khusus Presiden) dan mengutip pernyataan Lukman Hakim Syaifudin (Menteri Agama RI) beberapa saat setelah kejadian pembakaran Masjid. Keempat tokoh tersebut merupakan pejabat pemerintahan sehingga keputusan Detik.com mewawancarai mereka terkait aksi pemerintah jelas hanya ingin menegaskan pandangan mereka, bahwa pemerintah telah berbuat banyak untuk menangani kasus ini. Ini adalah strategi label otoritas ketokohan dengan menyebutkan satu-persatu jabatan mereka. Akan berbeda tentunya jika Detik.com memilih narasumber dari pihak netral atau bahkan pihak

yang jelas bertentangan dengan pemerintah. Namun hal itu rasanya tidak mungkin terjadi karena akan membiaskan pandangan Detik.com yang ingin khalayak tahu bahwa pemerintah tidak diam dan telah melakukan banyak hal untuk merajut kembali toleransi beragama di Bumi Tolikara Papua.

Dimuatnya berita ini oleh Detik.com tentunya menimbulkan pertanyaan mengapa media ini berani menegaskan pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk merajut toleransi yang sempat terkoyak di Tolikara. Hal ini pasti telah diantisipasi oleh Detik.com sebagai media yang telah lama eksis di dunia online Indonesia. Maka yang pasti ada adalah alasan-alasan atau bukti-bukti yang menegaskan bahwa fakta itu benar dan mampu menggiring opini khalayak. Dalam memenuhi unsur Mengapa (*Why*) dan juga sekaligus unsur Bagaimana (*How*) pada berita ini, Detik.com mengumpulkan aksi-aksi yang telah dilakukan pemerintah. Pertama adalah Detik.com menulis pernyataan Jusuf Kalla bahwa pemerintah telah bertindak tegas menghukum pelaku penyerangan musala. Ia juga telah meminta agar kepolisian dan pimpinan daerah setempat secepatnya menangani kasus tersebut.

Kemudian yang kedua Kapolri Jenderal Badrodin Haiti telah menindaklanjuti perintah JK, dengan meninjau langsung lokasi penyerangan di Tolikara. Aksi yang ketiga adalah Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin telah meminta Dirjen Birmas Kristen dan Kakanwil Kemenag Papua untuk menindaklanjuti kasus penyerangan terhadap warga di Karubaga. Dan yang keempat Detik.com juga menulis bahwa Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya memastikan pemerintah masih menyelidiki kebenaran surat edaran yang diduga dari Gereja Injil di Indonesia (GIDI). Ia juga siap terbang ke lokasi peristiwa.

Pemerintah juga akan membangun pasar kembali. Keempat aksi itulah yang dirangkum oleh Detik.com untuk memperkuat pandangan mereka bahwa pemerintah telah berpartisipasi aktif pasca terjadinya insiden.

Tabel 5. Ini Aksi Pemerintah Jokowi Merajut Toleransi Beragama yang Terkoyak di Tolikara

Judul Berita : Ini Aksi Pemerintah Jokowi Merajut Toleransi Beragama yang Terkoyak di Tolikara	
Unsur 5W + 1H	Skrip Berita
Apa (What)	Pada skrip berita ini Detik.com menyatakan bahwa Pemerintah sekuat tenaga merajut lagi kerukunan antar umat beragama di Papua.
Kapan (When)	Wawancara terhadap Jusuf Kalla dilakukan pada tanggal 19 Juli 2015. Wawancara Kapolri tidak disebutkan waktunya. Menteri Agama RI diambil pernyataan tertulisnya pada tanggal 17 Juli 2015. Lenis Kogoya diwawancarai pada Sabtu, 18 Juli 2015.
Di mana (Where)	Wawancara terhadap Jusuf Kalla dilakukan di kediamannya di Jalan Haji Bau, Makassar. Kapolri diwawancarai di Papua. Wawancara Kapolri dilakukan di Papua.

	<p>Menteri Agama RI tidak disebutkan dimana beliau diambil pernyataan tertulisnya.</p> <p>Lenis Kogoya diwawancarai di Kantor Staf Khusus Presiden RI-Gedung Sekretariat Negara, Jl Veteran III No 9-10, Jakarta Pusat</p>
Siapa (Who)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah - Pada skrip berita ini Detik.com mewawancarai Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI), Badrodin Haiti (Kapolri), Lenis Kogoya (Staf Khusus Presiden) dan mengutip pernyataan Lukman Hakim Syaifudin (Menteri Agama RI)
Mengapa (Why)	<p>Detik.com menyatakan pemerintah telah beraksi merajut toleransi di Tolikara dengan melakukan 4 aksi.</p>
Bagaimana (How)	<ul style="list-style-type: none"> - Detik.com menulis pernyataan Jusuf Kalla bahwa pemerintah telah bertindak tegas menghukum pelaku penyerangan musala. - Badrodin Haiti telah menindaklanjuti perintah JK, dengan meninjau langsung lokasi penyerangan di Tolikara. - Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin telah meminta Dirjen Birmas Kristen dan Kakanwil Kemenag Papua untuk

	<p>menindaklanjuti kasus penyerangan terhadap warga di Karubaga.</p> <p>- Detik.com juga menulis bahwa Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya memastikan pemerintah masih menyelidiki kebenaran surat edaran yang diduga dari Gereja Injil di Indonesia (GIDI). Ia juga siap terbang ke lokasi peristiwa. Pemerintah juga akan membangun pasar kembali.</p>
--	--

Selanjutnya dari analisis *tematik*, berita ini membawa dua tema besar. Yang pertama adalah peristiwa penyerangan terhadap umat Islam di Tolikara saat Idul Fitri telah memukul mundur toleransi beragama di Papua. Dan tema besar yang kedua adalah pemerintah telah sekuat tenaga merajut kembali kerukunan antar umat beragama di Papua. Kedua tema besar ini berada pada *Lead* berita.

Dari analisis *retoris*, Detik.com menyisipkan gambar Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memiliki arti penegasan kembali bahwa pemerintah tidak diam dan berupaya penuh menyelesaikan konflik Tolikara.

2. Frame *Republika.co.id*: MUI, Keberadaan Pemerintah Dipertanyakan di Tolikara

Selasa, 08 September 2015. Tepatnya lima puluh empat hari pasca berlangsungnya kejadian pembakaran Masjid, *Republika.co.id* kembali mengeluarkan rilis berita mengenai insiden tersebut. Kali ini peran pemerintah dalam penanganan kasus ini yang diangkat. Secara analisis *sintaksis* penulis

menilai judul pada berita ini mewakili pandangan Republika.co.id itu sendiri, dimana mereka mempertanyakan peran pemerintah dan juga mengatasnamakan MUI untuk memperkuat pandangan mereka agar dapat diterima dengan baik oleh khalayak.

Pada *Lead* berita ini, UUD 1945 ditegaskan sebagai pilar negeri ini dalam mengisi berbagai lini kehidupan termasuk beragama. Maka kasus ini teramat penting dan pemerintah harus hadir di dalamnya.

Kemudian melalui analisis *skrip*, kita dapat mengetahui bahwa berita ini memiliki kelengkapan unsur 5W + 1H pada teksnya. Untuk unsur Apa (*What*), Republika.co.id mengangkat isu dipertanyakannya keberadaan pemerintah pada insiden yang telah terjadi di Tolikara. Karena Tolikara berada dalam wilayah Indonesia, maka Indonesia harus menegakkan hukum di Tolikara.

Dari unsur Kapan (*When*), berita ini berisi wawancara yang dilakukan pada tanggal 08 September 2015. Waktu tersebut adalah masa menjelang perayaan Hari Besar Islam Idul Adha. Dalam hal ini penulis melihat pandangan Republika.co.id yang kembali berusaha mengingatkan isu ini agar seluruh pihak terkait dapat memastikan insiden yang pernah terjadi di Bulan Juli tidak terjadi kembali dan toleransi beragama di Bumi Pertiwi tidak tercoreng kembali. Momentum yang digunakan Republika.co.id sangat tepat. Keberadaannya sebagai salah satu media yang pro terhadap Islam membuatnya harus memiliki pandangan bahwa kerugian yang pernah dialami umat Islam di Tolikara tidak boleh terulang kembali. Maka dimunculkannya isu ini kembali di permukaan menjelang Idul Adha, ibarat sebuah sirine yang diperdengarkan untuk pemerintah. Agar pemerintah dapat berjaga dengan sigap dan mewaspadaai terjadinya hal serupa.

Tolikara masih menjadi tempat dalam pembahasan isu di berita ini, sebagai pemenuhan unsure Dimana (*Where*) dalam skrip berita berjudul “MUI, Keberadaan Pemerintah Dipertanyakan di Tolikara” ini. Lalu pada unsur Siapa (*Who*), Pemerintah RI dijadikan pihak yang diangkat isunya pada skrip berita ini. Demi memuluskan langkah untuk mempertanyakan kinerja pemerintah menangani kasus ini, *Republika.co.id* menggunakan label otoritas ketokohan dengan mewawancarai Cholil Nafis. Cholil Nafis adalah mantan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Pada unsur ini penulis menemukan kejanggalan bahwa judul yang diangkat oleh *Republika.co.id* mengatasnamakan MUI, namun narasumber yang dimintai keterangan hanya berstatus sebagai mantan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Hal ini tidak dapat diterima mengingat statusnya yang bukan lagi seorang pengurus membuatnya tidak berhak mencatut nama Majelis Ulama Indonesia yang masih cukup menjadi representasi pandangan umat Islam di Indonesia. Terlebih dalam isu ini menyangkut kinerja pemerintah, artinya nafas-nafas berbau politik sulit dihindari.

Maka penulis menilai pemilihan Cholil Nafis sebagai narasumber adalah sebuah strategi untuk memuluskan pandangan *Republika.co.id* bahwa pemerintah belum melakukan apa-apa untuk menangani kasus pembakaran Masjid di Tolikara. Penulis cukup menyayangkan tidak ada respon dari MUI terkait pencatutan nama yang dilakukan *Republika.co.id*. Respon yang minim dari masyarakat juga mendeskripsikan pemahaman masyarakat menelaah sebuah berita belum dapat dikategorikan baik. Butuh sosialisasi secara maksimal untuk membentuk masyarakat yang cerdas dan tidak mudah terprovokasi saat membaca sebuah berita.

Kemudian dari unsur Mengapa (*Why*), Republika.co.id mendasarkan pandangannya pada pernyataan Cholil Nafis yang mengatakan bahwa dengan adanya permintaan GIDI yang tidak menjamin keamanan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, hal ini dikarenakan dua tersangka dalam kasus pembakaran Masjid di Tolikara lalu tidak dibebaskan. Jika itu terjadi maka keberadaan pemerintah dipertanyakan, karena seharusnya pemerintah bisa bertindak tegas untuk memberikan pengamanan.

Dari unsur Bagaimana (*How*), muncul keharusan pemerintah untuk menangani kisruh yang telah terjadi pada Idul Fitri sekaligus mencegah terjadinya hal serupa pada saat Idul Adha.

Tabel 6. MUI, Keberadaan Pemerintah Dipertanyakan di Tolikara

Judul Berita : MUI, Keberadaan Pemerintah Dipertanyakan di Tolikara	
Unsur 5W + 1H	Skrip Berita
Apa (What)	Di paragraf awal Republika.co.id menulis Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan pilar negara bangsa Indonesia dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk beragama. Karena itu, pemerintah harus hadir di Tolikara, Papua.
Kapan (When)	Republika.co.id melakukan wawancara pada Selasa, 08 September 2015

Di mana (Where)	Insiden di Tolikara, lokasi wawancara tidak dituliskan.
Siapa (Who)	Republika.co.id mewawancarai Cholil Nafis selaku mantan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat.
Mengapa (Why)	Karena pemerintah mendiamkan ancaman GIDI yang tidak menjamin berlangsungnya Hari Raya Idul Adha di Tolikara.
Bagaimana (How)	Dengan adanya permintaan GIDI yang tidak menjamin pelaksanaan Idul Adha lantaran tidak membebaskan dua tersangka dalam kasus kerusuhan Idul Fitri kemarin. Maka, peran pemerintah harus hadir di Tolikara jika ada yang mengganggu umat Islam melaksanakan ibadah Idul Adha.

Selanjutnya melalui analisis *tematik*, teks pada berita ini membawa satu tema besar. Yaitu negara harus hadir dalam mengisi kehidupan beragama, karena itu termasuk amanah UUD 1945 dan Pancasila. Untuk analisis retorik, penulis tidak menemukan keterkaitan yang erat antara judul dan isi berita. Republika.co.id mengkonstruksi judul berita ini dengan pandangan mereka lalu berusaha mengaitkannya dengan pernyataan Cholil Nafis yang sebenarnya hanya menekankan negara harus hadir dan bukan meniadakan peran negara pada kasus ini.

3. Perbandingan Frame

Sebelum menganalisis secara skrip pada berita di atas, penulis memberikan dugaan awal bahwa isu mengenai peran pemerintah pada skrip berita di atas tidak akan terlepas dari kepentingan politik yang bersangkutan dengan kedua media tersebut.

Detik.com menuliskan poin utama di awal berita bahwa pemerintah sekuat tenaga merajut lagi kerukunan antar umat beragama di Papua. Artinya di awal Detik.com telah menegaskan bahwa pemerintah telah berperan dan tidak diam dengan insiden yang terjadi di Tolikara. Sementara itu Republika.co.id hanya menulis penekanan bahwa negara harus hadir dan belum memunculkan fakta kehadiran negara. Bahkan jika kita lihat judul pada pemberitaan di Republika.co.id maka dengan jelas kita dapat menyimpulkan kehadiran negara dalam insiden ini dipertanyakan, penulisan dilakukan dengan menyandarkan pada pendapat MUI.

Penulis melihat ada keinginan besar dari Detik.com untuk membentuk opini public bahwa pemerintah telah bekerja keras melakukan penyelesaian dan pemulihan pasca insiden ini. Hal ini bisa dibuktikan dengan menghadirkan langsung empat orang narasumber yaitu Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI), Badrodin Haiti (Kapolri), Lukman Hakim Syaifudin (Menteri Agama RI), Lenis Kogoya (Staf Khusus Presiden). Dapat dipastikan tentunya apa yang disampaikan ke-empat narasumber akan memberikan implikasi positif terhadap kinerja pemerintah mengingat ke-empatnya adalah bagian dari struktur pemerintahan itu sendiri. Alhasil opini yang dibangun adalah pemerintah telah merespon insiden itu

bahkan ditampilkan langsung empat aksi nyata pemerintah yang pada umumnya melakukan tinjauan langsung ke tempat kejadian insiden.

Di sisi lain penulis juga melihat keinginan besar dari Media Online Republika untuk membentuk opini publik bahwa respon pemerintah belum terlihat dan masih dipertanyakan dalam penanganan insiden Tolikara. Bahkan Republika.co.id melakukan upaya meligitimasi MUI dengan menjadikan Cholil Nafis sebagai narasumber yang notabene adalah mantan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Artinya sosok tersebut semestinya tidak bisa lagi mewakili MUI sebagai salah satu lembaga penting bagi Umat Islam Indonesia dalam mengambil suatu kesimpulan. Judul yang ditampilkan Republika.co.id juga terkesan sangat dipaksakan jika melihat isi pernyataan Cholil Nafis yang hanya menyatakan negara harus hadir. Cholil Nafis tidak menegaskan ketidakhadiran pemerintah atau mempertanyakan kehadirannya. Oleh karena itu penulis menilai pemberitaan Republika.co.id berusaha membentuk opini publik bahwa insiden ini luput dari perhatian pemerintah dan pemerintah gagal melindungi keamanan rakyat.

Seperti yang telah penulis sampaikan di atas sebagai dugaan awal. Isu mengenai peran pemerintah ini akan banyak dipengaruhi kepentingan politik. Pada isu ini Detik.com menjadi pihak yang pro pada pemerintah, terlihat dengan upayanya menjelaskan seluruh hal yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani insiden ini. Hal ini sejalan dengan beberapa isu lain sebelumnya, dimana Detik.com menjadi media yang pro terhadap pemerintah. Sebagai contoh misalnya pada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa BEM Jakarta Raya pada pertengahan Mei lalu. Detik.com menulis bahwa mahasiswa

hanya menuntut Gubernur DKI Jakarta turun dalam kasus isu polemik Ahok vs DPRD. Padahal mahasiswa melakukan demonstrasi di dua tempat yaitu Balai Kota dan DPRD serta jelas menuntut proses hukum keduanya harus diteruskan, namun Detik.com menulis pemberitaan yang mengindikasikan mahasiswa condong kepada DPRD dan menyudutkan pihak eksekutif sehingga citra pemerintahan DKI terselamatkan karena opini yang ada justru mahasiswa yang tidak netral dalam bergerak. Pada saat itu mahasiswa melakukan protes keras hingga Detik.com meralat pemberitaan. Ini artinya Detik.com secara politik seringkali memberikan pemberitaan yang positif atau paling tidak cukup untuk tidak merugikan pemerintah.

Sementara Republika.co.id bergerak sebagaimana media Islam lain yang berpandangan bahwa pemerintahan saat ini banyak merugikan Umat Islam seperti contohnya adalah pemblokiran situs-situs media Islam yang dinilai radikal. Hal ini menjadi pemakluman pada akhirnya muncul kritik—kritik terhadap pemerintah melalui media ini.

Tabel 7. Perbandingan *Frame*

Unsur 5W + 1H	Detik.com	Republika.co.id
Judul	Ini Aksi Pemerintah Jokowi Merajut Toleransi Beragama yang Terkoyak di Tolikara	MUI, Keberadaan Pemerintah Dipertanyakan di Tolikara
Apa (What)	Pada skrip berita ini Detik.com menyatakan bahwa Pemerintah	Di paragraf awal Republika.co.id menulis

	<p>sekuat tenaga merajut lagi kerukunan antar umat beragama di Papua.</p>	<p>Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan pilar negara bangsa Indonesia dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk beragama. Karena itu, pemerintah harus hadir di Tolikara, Papua.</p>
<p>Kapan (When)</p>	<p>Wawancara terhadap Jusuf Kalla dilakukan pada tanggal 19 Juli 2015.</p> <p>Wawancara Kapolri tidak disebutkan waktunya.</p> <p>Menteri Agama RI diambil pernyataan tertulisnya pada tanggal 17 Juli 2015.</p> <p>Lenis Kogoya diwawancarai pada Sabtu, 18 Juli 2015.</p>	<p>Republika.co.id melakukan wawancara pada Selasa, 08 September 2015</p>
<p>Di mana (Where)</p>	<p>Wawancara terhadap Jusuf Kalla dilakukan di kediamannya di Jalan Haji Bau, Makassar.</p> <p>Kapolri diwawancarai di Papua.</p> <p>Wawancara Kapolri dilakukan di Papua.</p>	<p>Insiden di Tolikara, lokasi wawancara tidak dituliskan.</p>

	<p>Menteri Agama RI tidak disebutkan dimana beliau diambil pernyataan tertulisnya.</p> <p>Lenis Kogoya diwawancarai di Kantor Staf Khusus Presiden RI- Gedung Sekretariat Negara, Jl Veteran III No 9-10, Jakarta Pusat</p>	
Siapa (Who)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah - Pada skrip berita ini Detik.com mewawancarai Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI), Badrodin Haiti (Kapolda), Lenis Kogoya (Staf Khusus Presiden) dan mengutip pernyataan Lukman Hakim Syaifudin (Menteri Agama RI) 	<p>Republika.co.id mewawancarai Cholil Nafis selaku mantan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat.</p>
Mengapa (Why)	<p>Detik.com menyatakan pemerintah telah beraksi merajut toleransi di Tolikara dengan melakukan 4 aksi.</p>	<p>Karena pemerintah mendiamkan ancaman GIDI yang tidak menjamin berlangsungnya Hari Raya Idul Adha di Tolikara.</p>
Bagaimana	<ul style="list-style-type: none"> - Detik.com menulis 	<p>Di paragraf awal</p>

a (How)	<p>pernyataan Jusuf Kalla bahwa pemerintah telah bertindak tegas menghukum pelaku penyerangan musala.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badrodin Haiti telah menindaklanjuti perintah JK, dengan meninjau langsung lokasi penyerangan di Tolikara. - Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin telah meminta Dirjen Birmas Kristen dan Kakanwil Kemenag Papua untuk menindaklanjuti kasus penyerangan terhadap warga di Karubaga. - Detik.com juga menulis bahwa Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya memastikan pemerintah masih menyelidiki kebenaran surat edaran yang diduga dari Gereja Injil di Indonesia 	<p>Republika.co.id menulis Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan pilar negara bangsa Indonesia dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk beragama. Karena itu, pemerintah harus hadir di Tolikara, Papua.</p>
---------	---	--

	(GIDI). Ia juga siap terbang ke lokasi peristiwa dan Pemerintah juga akan membangun pasar kembali.	
--	--	--

C. Isu/Peristiwa 3: Dugaan bahwa GIDI sebagai otak insiden pembakaran Masjid

Gereja Injili di Indonesia atau biasa disebut GIDI secara tiba-tiba menjadi pihak yang banyak disebut pada pemberitaan insiden Tolikara. Hal ini terjadi akibat munculnya surat yang berisi larangan merayakan salat Id di Tolikara, Papua. Namun tidak semua media menuliskan demikian. Penulis akan menganalisis dugaan GIDI sebagai otak insiden pembakaran Masjid melalui pemberitaan dua Media Online yaitu Detik.com dan Republika.co.id

1. *Frame* Detik.com: Minta Maaf Soal Insiden Tolikara, Presiden GIDI: Kami Tak Melarang Salat Id

Setelah merilis berita mengenai kronologi terjadinya peristiwa pembakaran Masjid, pada hari yang sama Detik.com kembali merilis berita mengenai insiden tersebut. Yaitu tepatnya pada tanggal 18 Juli 2015 pukul 18.11 WIB, kali Detik.com merilis berita berjudul “Minta Maaf Soal Insiden Tolikara, Presiden GIDI: Kami Tak Melarang Salat Id”. Berita ini merupakan respon dari berbagai dugaan yang menunjuk GIDI sebagai otak dari terjadinya insiden pembakaran Masjid di Tolikara.

Jika dianalisis dari unsur *sintaksis*, judul pada berita ini memiliki dua

makna. Yaitu permintaan maaf atas insiden yang terjadi, artinya GIDI merasa punya andil dalam terjadinya kisruh namun di sisi lain GIDI menyangkal bahwa mereka telah melarang umat Islam di Tolikara untuk melaksanakan shalat Ied. Penulis menilai adanya inkonsistensi dalam judul pemberitaan ini. Jika melihat kembali *trackrecord* Detik.com sebagai media sekuler, Detik berusaha menghilangkan nafas-nafas agama dalam insiden ini. Artinya ia berusaha menghilangkan kesalahan salah satu umat untuk menghindari terjadi konflik yang berlanjut. Hal ini juga bisa terlihat langsung pada *Lead* berita yang juga mengambil pernyataan yang menegaskan ketidaktahuan GIDI, dengan kata lain ingin mengatakan GIDI tidak bersalah.

Gambar 4. *Lead* berita Minta Maaf Soal Insiden Tolikara, Presiden GIDI: Kami Tak Melarang Salat Id

Jakarta - Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikmbo meminta maaf kepada umat muslim atas insiden penyerangan di Karubaga, Tolikara saat digelarnya Salat Id pada Jumat (17/7/2015) kemarin. Dia menyesalkan dan mengaku tidak mengetahui adanya insiden tersebut.

Kemudian pada analisis *skrip*, Detik.com telah memenuhi seluruh unsur yang ada yaitu 5W + 1H. Pada unsur Apa (*What*), permintaan maaf Presiden GIDI menjadi topic yang diangkat pada berita ini. Hal ini merupakan respon dari kabar-kabar yang beredar bahwa GIDI yang menjadi inisiator perilaku anarkis tersebut. Terlebih saat beredarnya surat larangan melaksanakan shalat Ied di Tolikara, GIDI semakin tertuduh dan dalam hal ini Presiden GIDI meminta maaf dan berusaha mengklarifikasi dengan menjelaskan fakta yang sebenarnya.

Dari unsur Kapan (*When*), permohonan maaf yang dikeluarkan Presiden GIDI ini disampaikan pada saat Detik.com mewawancarainya pada tanggal 18 Juli

2015 di Karubaga, Tolikara, Papua yang sekaligus memenuhi unsure Dimana (*Where*) dalam berita tersebut. Untuk unsur Siapa (*Who*) pada berita ini, Detik.com mengambil pernyataan Presiden GIDI (Gereja Injili di Indonesia) yaitu Pendeta Dorman Wandikmbo. Detik.com mengambil pernyataan Pendeta Dorman karena merasa sosok ini sudah sepatutnya mengklarifikasi berita yang telah terlanjur beredar. Lagi-lagi Detik.com menggunakan label otoritas ketokohan untuk menguatkan pandangannya.

Pada unsur Mengapa (*Why*), permintaan maaf yang dikeluarkan Presiden GIDI ini muncul karena terdapat dugaan bahwa GIDI adalah pihak yang mengeluarkan surat larangan melaksanakan shalat Idul Fitri di Tolikara. Hal ini semakin memperbesar dugaan bahwa GIDI adalah otak dari proses penyerangan yang terjadi terhadap umat Islam di Tolikara. Oleh karena itu Presiden GIDI bersikap untuk segera mengklarifikasi.

Penulis menilai terdapat kejanggalan pada berita ini. Pernyataan Presiden GIDI jelas membenarkan bahwa terdapat surat yang keluar dari Ketua Klasis dan Ketua Wilayah GIDI Tolikara yang berisi larangan untuk melakukan shalat Ied di lapangan terbuka. Namun pada judul berita dapat kita lihat terdapat kalimat “Kami Tidak Melarang Shalat Ied”, hal ini jelas merupakan pertentangan antara judul dan isi berita. Cara ini dapat dilakukan sebuah media sebagai upaya penggiringan opini khalayak pada pandangan yang dimiliki oleh media itu sendiri sesuai dengan ideologinya.

Kemudian pada unsur Bagaimana (*How*), Detik.com menjelaskan pada dasarnya GIDI melarang umat Islam untuk melaksanakan shalat Ied di lapangan terbuka. Umat Islam mereka sarankan untuk melaksanakan shalat di dalam musala

saja. Pernyataan ini juga selaras dengan perkataan Pendeta Dorman yang juga mengatakan bahwa saran melakukan shalat Ied di musala karena pada waktu yang bersamaan akan digelar ibadah/seminar internasional GIDI di Kabupaten Tolikara.

Tabel 8. Minta Maaf Soal Insiden Tolikara, Presiden GIDI: Kami Tak Melarang Salat Id

Judul berita : Minta Maaf Soal Insiden Tolikara, Presiden GIDI: Kami Tak Melarang Salat Id	
Elemen 5W + 1H	Skrip Berita
Apa (What)	Skrip berita di Detik.com ini menuliskan Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikmbo meminta maaf kepada umat muslim atas insiden penyerangan di Karubaga. Dia menyesalkan dan mengaku tidak mengetahui adanya insiden tersebut.
Kapan (When)	Wawancara dilakukan pada Sabtu, 18 Agustus 2015.
Di mana (Where)	Karubaga Kabupaten Tolikara, Papua.
Siapa (Who)	Detik.com mewawancarai Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikmbo
Mengapa	Munculnya dugaan surat larangan melaksanakan salat

(Why)	idul fitri dari GIDI.
Bagaimana (How)	Berikut ini adalah pernyataannya "Memang kami menyadari selaku umat beragama kita tidak bisa melarang orang beribadah, untuk itu kami sarankan agar Salat Id tidak dilaksanakan di lapangan terbuka," kata Pdt. Dorman Wandikbo, Sabtu (18/7/2015) di Tolikara.

Dari analisis *tematik*, berita ini menyertakan tema besar di dalam teksnya.

Pertama bahwa GIDI melalui presidennya meminta maaf kepada umat Muslim di Tolikara dan menyesalkan kejadian tersebut serta mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut. Tema besar yang pertama ini dapat dilihat pada *Lead* berita.

Gambar 5. *Lead* berita Minta Maaf Soal Insiden Tolikara, Presiden GIDI:

Kami Tak Melarang Salat Id

Jakarta - Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikmbo meminta maaf kepada umat muslim atas insiden penyerangan di Karubaga, Tolikara saat digelarnya Salat Id pada Jumat (17/7/2015) kemarin. Dia menyesalkan dan mengaku tidak mengetahui adanya insiden tersebut.

Selanjutnya pada unsur *retoris*, pada berita ini Detik.com juga menggunakan label otoritas ketokohan dengan menghadirkan langsung Ketua Gereja Injili di Indonesia sebagai narasumber untuk menanggapi dugaan yang beredar. *Point* ini penting mengingat ini adalah persoalan toleransi antar umat beragama maka perlu para pimpinan agama itu sendiri yang mengeluarkan pernyataan. Agar dugaan-dugaan tersebut tidak semakin meluas.

2. *Frame* Republika.co.id: Kesaksian Jemaat GIDI Soal Penyerangan Masjid di Tolikara

Pandangan penulis mengenai keinginan Republika.co.id untuk mengungkit kembali insiden pembakaran Masjid di Tolikara menjelang Hari Raya Idul Adha semakin menguat saat melihat berita ini. Berita ini diturunkan pada tanggal 19 September 2015 tepat menjelang Hari Raya Idul Adha. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan seluruh pihak agar kejadian di Idul Fitri tidak terulang kembali pada saat Idul Adha.

Melalui analisis *sintaksis*, judul pada berita ini memperlihatkan keinginan Republika.co.id menghadirkan saksi dari pihak GIDI yang dinilai mampu membeberkan fakta yang sebenarnya. Karena secara umum kita akan bisa menilai jika yang diangkat adalah persaksian dari umat Islam maka hampir dapat dipastikan kecenderungannya untuk membela agamanya sendiri. Mungkin kita akan berpikir sama jika terjadi sebaliknya, namun ternyata ada Jemaat GIDI yang membeberkan fakta di luar perkiraan kita secara umum. Maka hal ini sangat seksi untuk diangkat Republika.co.id dan dimunculkan pada judul berita.

Jika dianalisis dengan unsur *skrip*, teks pada berita ini telah memenuhi unsur 5W + 1H yang memang harus ada dalam sebuah berita. Pada berita ini, Republika.co.id menjadikan isu kesaksian mengenai penyerangan Masjid menjadi unsur Apa (*What*) pada teks berita. Hal ini kembali diungkit karena memang belum ada kelanjutan yang pasti terkait kasus tersebut, dalam hal ini Republika.co.id selaku media yang condong pada umat islam tentunya berupaya mengangkat kembali agar dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku di negeri ini.

Pada unsur Kapan (*When*), kesaksian yang diberikan jemaat GIDI disampaikan pada tanggal 19 September 2015 usai pertemuan di kediaman Hasyim Muzadi. Di Depok, Jawa Barat, yang juga sekaligus memenuhi unsur Dimana (*Where*) pada berita ini. Kemudian pada unsure Siapa (*Who*) tentunya muncul banyak pertanyaan siapa saksi dari pihak GIDI yang bersedia memberikan pernyataan kesaksian. Ia adalah Pandi Mur Yikwa yang merupakan tokoh masyarakat Tolikara dan juga sebagai anggota GIDI.

Selanjutnya pada unsur Mengapa (*Why*), pernyataan dari Jemaat GIDI ini bisa muncul karena proses hukum tersangka pembakaran Masjid belum juga usai. Pihak korban tewas juga menuntut keadilan agar menindak tegas kasus ini secara hukum nasional, bukan hukum adat. Terlebih lagi terdapat unsur paksaan agar kasus ini bisa diselesaikan secara hukum adat. Dimana pihak korban dipaksa menandatangani kesepakatan perdamaian di bawah ancaman maupun sogokan. Pada unsur Bagaimana (*How*), Republika.co.id mengutip pernyataan Endi Wanimbo selaku pihak korban dan juga saksi mata yang mengatakan bahwa kasus ini adalah konflik yang disetting oleh aktor intelektual karena faktor politik, bukan murni konflik agama. Dimana aktor intelektual tersebut menurutnya adalah Bupati Tolikara yang juga merupakan Ketua Pelaksana Seminar dan KKR Internasional yang diadakan bertepatan dengan Idul Fitri 1436 H lalu.

Dari analisis *tematis*, terdapat dua tema besar pada berita yang dirilis jelang Idul Adha ini. Pertama adalah pihak korban menuntut keadilan agar menindak tegas kasus ini secara hukum nasional, bukan hukum adat. Yang kedua adalah pernyataan Endi Waknimbo yang mengatakan bahwa kasus ini adalah konflik yang disetting oleh aktor intelektual karena faktor politik, bukan murni

konflik agama.

Dari analisis *retoris*, Republika.co.id memuat gambar sisa-sisa Masjid Tolikara yang dibakar. Hal ini untuk mengingatkan kembali kasus ini begitu besar dan meugikan umat Islam, sehingga penekanan agar diselesaikannya proses hukum kasus ini dapat berlangsung dengan cepat dan tepat.

Tabel 9. : Kesaksian Jemaat GIDI Soal Penyerangan Masjid di Tolikara

Judul berita : Kesaksian Jemaat GIDI Soal Penyerangan Masjid di Tolikara	
Unsur 5W + 1H	Skrip Berita
Apa (What)	Ada jemaat GIDI yang memberikan pernyataan bahwa kasus Tolikara ini adalah konflik yang disetting oleh aktor intelektual karena faktor politik.
Kapan (When)	Kesaksian disampaikan pada tanggal 19 September 2015
Di mana (Where)	Karubaga Kabupaten Tolikara, Papua.
Siapa (Who)	Pandi Mur Yikwa yang merupakan tokoh masyarakat Tolikara dan juga sebagai anggota GIDI.
Mengapa (Why)	Isu ini kembali diangkat karena persoalan hukum belum selesai. Saksi menilai ini bukan hanya konflik agama tapi

	juga politik.
Bagaimana (How)	Ia menggambarkan keadaan Umat Muslim di Tolikara yang dalam keadaan terpaksa, seperti harus mengecat rumah dengan warna tertentu dan terancam diusir jika tidak mengikuti.

3. Perbandingan Frame

Salah satu cara yang efektif untuk membentuk sebuah opini pada berita adalah dengan menghadirkan narasumber yang dapat dipastikan akan memberikan keterangan sesuai dengan kepentingan yang diinginkan pihak media. Pada pemberitaan di kedua media ini misalnya, Detik.com menjadikan Pendeta Dorman Wandikmbo sebagai narasumber yang telah jelas menegaskan GIDI hanya memberikan saran agar salat Id tidak dilaksanakan di lapangan terbuka. Beliau juga menjelaskan bahwa selama ini Tolikara hidup rukun, Islam dan Kristen hidup berdampingan dengan aman.

Berbeda tentunya dengan pernyataan Endi Wanimbo yang menjadi korban pada insiden ini. Ia menggambarkan keadaan Umat Muslim di Tolikara yang dalam keadaan terpaksa, seperti harus mengecat rumah dengan warna tertentu dan terancam diusir jika tidak mengikuti. Ia juga melihat adanya unsure politik dalam insiden ini. Ini artinya kedua media tersebut mengambil pernyataan mengenai isu yang sama dari dua narasumber yang berbeda sehingga masing-masing memiliki kekuatan untuk membangun opininya di masyarakat.

Tabel 10. Perbandingan *Frame*

Elemen	Detik.com	Republika.co.id
Judul	Minta Maaf Soal Insiden Tolikara, Presiden GIDI: Kami Tak Melarang Salat Id	Kesaksian Jemaat GIDI Soal Penyerangan Masjid di Tolikara
Apa (What)	Skrip berita di Detik.com ini menuliskan Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikmbo meminta maaf kepada umat muslim atas insiden penyerangan di Karubaga. Dia menyesalkan dan mengaku tidak mengetahui adanya insiden tersebut.	Ada jemaat GIDI yang memberikan pernyataan bahwa kasus Tolikara ini adalah konflik yang disetting oleh aktor intelektual karena faktor politik.
Kapan (When)	Wawancara dilakukan pada Sabtu, 18 Agustus 2015.	-
Di mana (Where)	Karubaga Kabupaten Tolikara, Papua.	Karubaga Kabupaten Tolikara, Papua.
Siapa (Who)	Detik.com mewawancarai Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikmbo	Republika.co.id mewawancarai Endi Wanimbo, seorang jemaat GIDI yang juga menjadi

		korban.
Mengapa (Why)	Munculnya dugaan surat larangan melaksanakan salat idul fitri dari GIDI.	Ia menilai ini bukan hanya konflik agama tapi juga politik.
Bagaimana (How)	Berikut ini adalah pernyataannya "Memang kami menyadari selaku umat beragama kita tidak bisa melarang orang beribadah, untuk itu kami sarankan agar Salat Id tidak dilaksanakan di lapangan terbuka," kata Pdt. Dorman Wandikbo, Sabtu (18/7/2015) di Tolikara.	Ia menggambarkan keadaan Umat Muslim di Tolikara yang dalam keadaan terpaksa, seperti harus mengecat rumah dengan warna tertentu dan terancam diusir jika tidak mengikuti.